

KOTA BAUBAU SEBAGAI WARISAN SEBUAH PERADABAN YANG LESTARI DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUTON

Hadiati

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
d_raniya009@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 8 orang secara purposive sampling. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ditempuh melalui teknik; observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data base objek daerah tujuan wisata Kota Bau-Bau cukup dioptimalkan dalam penyusunan strategi pengembangan objek wisata. Hal ini ditandai dengan seringnya menggunakan data base objek wisata budaya dan data base objek wisata alam dalam penyusunan strategi pengembangan objek wisata. Selain itu ada empat strategi pengembangan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau yakni pembenahan objek wisata alam dan budaya, promosi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, dan pelestarian nilai budaya pada masyarakat yang berdomisili di Baubau, bahwa masyarakat Buton di dalam kehidupan kesehariannya selalu memegang teguh atau berpedoman pada nilai-nilai dan norma yang secara tradisional telah diturunkan sejak dari nenek moyang mereka. Nilai utama tersebut adalah 'Po binci-binciki kuli' yang secara harfiah diartikan sebagai dua orang yang saling mencubit diri sendiri, yang apabila sakit saat mencubit diri sendiri berarti sakit pula kalau kita mencubit orang lain. Nilai inilah yang menjadi sosial kontrol dalam interaksi kemasyarakatan.

Kata Kunci : Kota Baubau, Warisan Sebuah Peradaban, Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Buton

Pendahuluan

Selama ini, nama Buton dikenal sebagai pulau yang dikenal di nusantara dan berbagai mancanegara sebagai pulau penghasil aspal. Secara harfiah, 'Buton' memiliki banyak arti. Pertama dalam konteks geografis, 'Buton' berarti 'Pulau Buton' yang terletak di ujung semenanjung Sulawesi Tenggara. Kedua dalam konteks politik, 'Buton' berarti 'Kabupaten Buton', yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terdiri atas bagian selatan Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena, beberapa pulau kecil, dan sebagian semenanjung Sulawesi Tenggara. Ketiga dalam konteks kesultanan, 'Buton' bisa digunakan untuk menyebut orang-orang dari daerah Buton, termasuk orang dari Kabupaten Muna (Palmer, 2004). Di Pulau Buton, dulu pernah berdiri sebuah kerajaan atau kesultanan yang bernama Buton atau Wolio. Sebagai sebuah negara, Buton memiliki sistem pemerintahan dengan bentuk sebuah kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-15, yang didirikan oleh pendatang yang berasal dari Johor. Pada perkembangannya, sekitar abad ke-16 dengan masuknya ajaran agama Islam, status kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan ini pun bisa bertahan selama 400 tahun, dan pada abad ke-20 (tahun 1960) berakhir setelah Sultan Laode Muhammad Falihi wafat (Zahari 1977, Yunus 1995, Zuhdi 1999, Schoorl, 2003).

Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelum atau pra-pemekaran, wilayah Kabupaten Buton merupakan sebuah kabupaten yang wilayahnya meliputi sebagian Pulau Buton, sebagian Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena dan sebagian Jazirah Sulawesi Tenggara. Pada saat itu ibukota Kabupaten Buton berada di Kota Bau-Bau yang berstatus sebagai kota administratif (kotif). Wilayah Kabupaten Buton sebelum terjadi pemekaran (sebelum tahun 2001) meliputi 21 kecamatan yang tersebar di wilayah yang cukup luas, dan sebagian wilayahnya terdiri dari pulau-pulau.

Salah satu kendala utama yakni transportasi bagi penduduk di Kabupaten Buton, terutama bagi penduduk yang tinggal di berbagai tempat yang jauh dengan Bau-Bau. Pada tahun 2001 Bau-Bau mekar dan meningkat statusnya menjadi kota Bau-Bau dan saat itu mulai

dilakukan pembenahan dan pengembangan potensi yang dimiliki kota bau-bau sampai saat ini.

Metode

Metode pendekatan yang dilakukan pada penulisan ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mengumpulkan fakta melalui observasi, literatur kepustakaan dan tulisan media kemudian menguraikan secara menyeluruh sesuai dengan persoalan dan langkah penyelesaian permasalahannya.

Hasil Dan Pembahasan

Setting penelitian ini di wilayah bekas Kesultanan Buton khususnya wilayah Kota Bau-Bau. Secara geografis Kota Bau-Bau terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan merupakan bekas pusat kekuasaan Kesultanan Buton. Wilayah Kota Bau-Bau pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, sebelah selatan dengan Laut Flores, sebelah timur dengan Laut Banda dan sebelah Barat dengan Teluk Bone. Daerah ini secara astronomis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa atau tepatnya $04^{\circ} 00' LS - 06^{\circ} 05' LS$ dan membentang dari barat ke timur dari $120^{\circ} 03' - 125^{\circ} 00' BT$. Adapun kondisi topografi wilayah ini cenderung bergelombang atau berbukit-bukit dengan kondisi lahan sebagian besar berbatu-batu (batuan karst) dan lapisan top soil yang tipis sehingga pada umumnya lahan di daerah ini kurang subur.

Kondisi geografis dari Kota Bau-Bau yang terdiri dari kepulauan dan laut yang luas ini membuat iklim dan aktifitas masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh laut. Dari sisi iklim, rata-rata dengan suhu udara tertinggi 33,3 derajat celcius dan terendah 26,4 derajat celcius. Laut yang luas membuat daerah sangat baik bagi pembudidayaan rumput laut dan mutiara sehingga daerah ini juga merupakan penghasil rumput laut dan mutiara yang cukup besar jumlahnya. Mata pencaharian penduduknya banyak bekerja di sektor kelautan seperti nelayan, pelaut, dan pedagang. Pada wilayah Kepulauan Tukang Besi menjadi bagian yang mencolok dan dikenal

dalam karakteristik umum orang Buton sebagai salah satu populasi yang paling ekspansif di bagian timur Indonesia.

Falsafah Hidup

Seiring dengan perputaran waktu, penduduk kerajaan ini semakin banyak dan wilayahnya semakin luas, karena banyaknya kelompok-kelompok masyarakat dan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pulau Buton dan sekitarnya bergabung dengan kerajaan tersebut. Untuk mengatur wilayah yang semakin luas dan penduduk yang semakin banyak, maka keempat orang bonto tersebut kemudian melakukan perundingan dan bermusyawarah untuk memikirkan perlunya suatu dasar hukum yang dapat digunakan dalam mengatur tata krama pergaulan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebutlah mereka melahirkan suatu konsep falsafah hidup orang Buton, yang dikenal dengan istilah : *pobinci-binciki kuli*. Secara harfiah *pobinci-binciki kuli* diartikan sebagai dua orang yang saling mencubit dirinya sendiri, apabila terasa sakit baginya berarti pula sakit bagi orang lain. Artinya semua manusia mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama dan hak asasi yang sama.

Perkembangan lebih lanjut falsafah *pobinci-binciki kuli* ini kemudian dijabarkan dalam empat pola perilaku dasar yang harus dikembangkan yakni :

1. *Pomae-maeaka* (saling menghormati antara sesama anggota masyarakat)
2. *Pomaa-maasiaka* (saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat).
3. *Popia-piara* (saling memelihara antar sesama anggota masyarakat).
4. *Poangka-angkataka* (saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat).

Pasca dilantiknya Sultan Murhum sebagai sultan pertama dalam Kesultanan Buton, maka wilayah kesultanan semakin luas akibat bergabungnya daerah-daerah seperti Muna, Tiworo, Kulisusu, Pulau-pulau Tukang Besi (Wanci, Waledupa, Tomia, dan Binongko), Kabaena dan lain. Kondisi ini berimplikasi pada semakin banyaknya gangguan keamanan dalam wilayah kesultanan. Oleh karena itu, maka dewan kesultanan menyusun lagi falsafah hidup mereka untuk melengkapi falsafah Buton *pobinci-binciki kuli* yang pernah ada pada masa sebelumnya.

Falsafah Buton kedua ini menunjukkan urutan dari kepentingan yang harus diperhatikan dan dikorbankan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu. Adapun urutannya adalah (1) *arataa* (harta benda), (2) *karo* (diri/pribadi), (3) *lipu* (negara/kesultanan), (4) *sara* (sistem pemerintah), dan (5) agama (ajaran/syariat islam). Kemudian falsafah ini dikemas dalam bahasa atau doktrin yang dapat menggugah jiwa dan semangat untuk berjuang dan berkorban bagi masyarakat terhadap kesultanan. Doktrin dalam kesultanan ini dijabarkan lagi lebih spesifik yakni *bolimo araata somanamo karo*, *bolimo karo somanamo lipu*, *bolimo lipu somanamo sara*, dan *bolimo sara somanamo agama*.

Pranata Sosial

Agama dan Kepercayaan

Sebagai wilayah bekas kesultanan, masyarakat Buton mayoritas penduduknya memeluk beragama islam, dan boleh dikatakan sangat jarang menemukan orang Buton yang memeluk agama selain agama islam. Salah satu lembaga keagamaan dengan syariat islam yang sudah ada sejak zaman kesultanan hingga saat ini masih berfungsi adalah pejabat / pengurus Masjid Agung Keraton Buton atau disebut juga *sara kidina* atau *hukumu*. Di zaman Kesultanan Buton, lembaga ini mempunyai peran yang cukup besar dan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kondisi ini didukung oleh system pemerintahan sangat kental dengan hal-hal yang bersifat keagamaan khususnya syariat islam. Tidaklah mengherankan jika

kemudian banyak Sultan Buton yang terpilih memiliki pengetahuan agama atau seorang yang ahli dalam bidang agama. Struktur lembaga *sara kidina* hingga saat ini masih fungsional walaupun sistem pemerintahan atau *sara ogena* sudah tidak ada seiring bergabungnya Buton dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi jabatan *mokimu* sebanyak empat puluh orang yang dulu pernah ada, sekarang tidak ada lagi seperti masa kesultanan. Eksistensi lembaga ini tetap dipertahankan masyarakat Buton dan masih tetap berfungsi di tengah arus modernisasi. Adanya dukungan masyarakat terhadap eksistensi lembaga agama ini disebabkan adanya fungsi mereka dalam hal tertentu khususnya dalam acara-acara perkawinan dan kematian. Pada umumnya orang Buton sangat yakin dengan kemampuan para pejabat syara agama ini dalam hal-hal tersebut. Ketika melakukan penelitian, saya masih menjumpai beberapa warga Buton yang menjadikan lembaga ini sebagai tempat untuk membaca doa, memohon keselamatan dan tujuan-tujuan tertentu kepada Allah SWT.

Pengurus lembaga ini dengan pakaiannya yang khas berupa jubah, sorban dan tongkat memusatkan kegiatan mereka di Mesjid Agung Keraton Buton. Dalam waktu-waktu tertentu, mereka melakukan ritual tertentu seperti berdoa dan berzikir untuk menjaga secara spritual wilayah Buton dari berbagai kekacauan dan bahaya yang mengancam wilayah Buton.

Sistem Perkawinan

Seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia yang menganut sistem perkawinan secara endogami, sistem perkawinan dalam masyarakat Buton pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, perkawinan antara saudara sepupu sekali tidak diinginkan, tetapi diidealkan dengan kerabatnya atau hubungan keluarga sudah menjauh misalnya sepupu empat kali (*poabaaka*).

Dahulu perkawinan dalam masyarakat Buton hanya terjadi status sosial (*kamia*) yang setara, seperti kelompok *kaomu* dengan *kaomu*, kelompok *walaka* dengan *walaka* dan kelompok *papara* dengan *papara*. Namun demikian, ada beberapa kasus perkawinan antar lapis sosial. Perkawinan setara atau persamaan status sosial (*kamia*) dalam konsepsi masyarakat Buton dikenal dengan istilah *kufu*, dengan tujuan mempertahankan kemurnian status sosial (*kamia*). Namun demikian laki-laki yang memiliki status sosial (*kamia*) *kaomu* boleh mengawini perempuan yang memiliki status sosial (*kamia*) *walaka* atau *papara*. Seorang lakilaki *papara* atau *walaka* tidak boleh kawin dengan wanita *kaomu*, kecuali dengan cara-cara tertentu seperti membayar uang mahar yang lebih mahal sebagai penebusan *kamia* wanita yang dinikahi tersebut. Berdasarkan catatan Ma'mun (1992) bahwa sepanjang sejarah pemerintahan Kesultanan Buton, banyak terjadi peristiwa penyimpangan dari perkawinan yang berdasarkan ketentuan adat harus setara atau *kufu* tersebut. Secara umum, ada beberapa tipe atau model yang digunakan oleh masyarakat Buton dalam melakukan perkawinan: Sistem Perkawinan *Pobaisa*, Sistem Perkawinan *Popalaisaka*, Sistem Perkawinan *Uncura*, Sistem Perkawinan *Humbuni*

Kesenian

Ada berbagai tari-tarian tradisional yang terkenal, diantaranya; tari lariangi dan tari sajo moane berasal dari Kepulauan Tukang Besi (sekarang Kabupaten Wakatobi), tari galangi, tari mangaru, dan tari kenta-Kenta. tari lariangi merupakan tarian kerajaan yang sudah sangat tua dan pakaian yang dikenakannya pun masih tetap seperti dulu, sedang tari sajo moane merupakan tarian yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur 7 - 12 tahun atau usia sekolah dasar. Tari ini menceritakan kegigdayaan anak-anak bermain silat dan perang-perangan.

Semua tari yang tersebut di atas merupakan tari tradisional. Sementara tari kreasi baru tampak belum berkembang sehingga pagelaran tari dalam acara-acara resmi lebih banyak didominasi tari-

tari tradisional. Selain seni tari, masyarakat Buton juga mengenal seni rupa dan seni ukir. Beragam jenis kesenian ini sudah tidak asing bagi masyarakat karena terwujud dalam bentuk alat-alat rumah tangga yang terbuat dari macam-macam bahan. Hasil keterampilan ini disamping untuk dikonsumsi dalam rumah tangga sendiri, juga dijual dalam skala lokal maupun di luar Kota Bau-Bau.

Bahasa

Keberagaman etnis juga disertai dengan beragam bahasa yang digunakan masing-masing kelompok dalam wilayah Kesultanan Buton. Bahasa Wolio merupakan bahasa yang digunakan pada kesultanan atau bahasa resmi kesultanan dan umumnya digunakan oleh kelompok *kaomu-walaka*. Saat ini, bahasa ini umumnya dijumpai pada penduduk yang bermukim di Kecamatan Murhum, Wolio, dan Bungi di Kota Bau-Bau. Namun demikian, bahasa ini dulu digunakan sebagai bahasa pengantar apabila para tokoh-tokoh masyarakat dari pengguna bahasa yang berbeda-beda ini berkomunikasi. Selain Bahasa Wolio, dalam wilayah Kesultanan Buton tersebar beberapa bahasa. Bahasa-bahasa tersebut adalah Bahasa Wawonii, Kulisusu, Kambowa, Kumbewaha, Cia-Cia, Gonda Baru, Todanga (Bahasa dalam wilayah Pulau Buton); Wasilomata, Muna, Jawa (Bahasa di Pulau Muna), Morunene, Siompu dan Rahantari (Bahasa di Pulau Kabaena), dan Pulo (Kapota), Pulo (Kaledupa), Pulo (Tomia), dan Pulo (Binongko) (Bahasa dalam gugusan Kepulauan Tukang Besi). Seiring dengan terintegrasinya wilayah Buton dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia, maka umumnya orang Buton menggunakan Bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam kehidupan sehari-hari.

Kekayaan yang dimiliki dari warisan budaya Buton, ini oleh pemerintah Kota Bau-bau melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau menjadi kekuatan untuk dipromosikan pada dunia luar. Dengan menetapkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau

Visi

Visi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau adalah *“Menjadikan Kota Bau-Bau sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka di kawasan timur Indonesia dan Kota Bau-Bau sebagai pusat pelayanan wisata untuk daerah tujuan wisata di sekitar Kota Bau-Bau, serta menjadikan sektor wisata di Kota Bau-Bau sebagai sektor penggerak ekonomi lokal dan pendorong lestari dan majunya tradisi lokal”*.

Misi

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 misi yang menjadi sasaran untuk mencapainya. Keenam misi yang dimaksud adalah:

1. Mengidentifikasi dan secara terintegrasi mengembangkan produk wisata dan pelayanan wisata yang berkualitas tinggi yang dapat menjadi andalan dalam mengembangkan ekonomi dan budaya Kota Bau-Bau.
2. Merumuskan strategi promosi yang dapat menonjolkan keunggulan dan keunikan produk dan pelayanan wisata Kota Bau-Bau serta menjawab tantangan tingginya persaingan dengan tujuan wisata lainnya.
3. Menggalang kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah kota, sektor wisata dan masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata.
4. Mendorong tumbuhnya investasi di sektor kepariwisataan.
5. Melakukan sosialisasi objek-objek wisata di Kota Bau-Bau kepada masyarakat Kota Bau-Bau dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pelayanan kepariwisataan
6. Menggalang kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku sektor pariwisata antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat Kota Bau-Bau dengan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat kabupaten-kabupaten di sekitar Kota Bau-Bau yang juga memiliki objek wisata andalan.

Adapun strategi yang dilakukan pemerintah kota bau-bau melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau adalah membuat dan memanfaatkan data base objek daerah tujuan wisata Kota Bau-Bau terdapat dua jenis data base objek daerah tujuan wisata yakni:

1. Data base objek wisata alam

Data base objek wisata alam merupakan data mengenai objek wisata alam yang ada di Kota Bau-Bau. Objek wisata alam, yaitu taman laut, pantai laut, air panas, air terjun, daerah pegunungan dan danau alam. Dalam data base objek wisata alam Kota Bau-Bau terdapat beberapa objek wisata alam diantaranya: Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Kolagana, Kokalukuna, Permandian Bungi, Permandian Alam Lagawuna, Air Terjun Samparona, Tirta Rimba, Liwuto.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan data base objek wisata alam terhadap penyusunan strategi pengembangan objek wisata Kota Bau-Bau pada Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau telah dilakukan, walaupun sampai saat ini potensi pariwisata alam Kota Bau-Bau masih kalah menarik bila dibandingkan dengan objek wisata alam yang ada di daerah lain seperti Bali.

Dukungan data base objek wisata alam dalam penyusunan strategi pengembangan objek wisata Kota Bau-Bau sangatlah penting agar dapat meningkatkan minat para wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk mengunjungi objek wisata alam yang ada di daerah ini. Namun sejauh ini objek wisata alam yang ada belum dapat dikembangkan sebagaimana mestinya karena pada dasarnya potensi pariwisata terbesar yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau adalah objek wisata budaya.

2. Data Base Objek Wisata Budaya

Data base objek wisata budaya adalah data mengenai obyek wisata budaya yang ada di Kota Bau-Bau. Objek wisata budaya, yaitu rumah-rumah adat, gua-gua purbakala, tempat-tempat bersejarah, tarian-tarian, kerajinan rakyat dan atraksi-atraksi tertentu. Dalam data base objek wisata budaya Kota Bau-Bau terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya: Tempat-tempat Bersejarah : Benteng Keraton Buton, Masjid Agung Keraton Buton, Masjid Quba, Malige, Batu Popaua, Batu Wolio/Yigandangi, Makam Sultan Murhum, Batu Poaro. Tradisi Budaya : Qunua, Tradisi Pekakande-Kandea, Posuo, Haroa Maludu, Dole-Dole, Ma'Taa.

Strategi Pengembangan Objek Wisata Kota Bau-Bau

1. Pembenahan Objek Wisata Alam dan Budaya

Berdasarkan pada karakter dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh daerah Kota Bau-Bau, maka pemerintah memerlukan beberapa strategi pengembangan objek wisata sehingga dapat mewujudkan Bau-Bau menjadi Kota Wisata terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Pembenahan objek wisata alam dan budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau benar-benar diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi daerah Kota Bau-Bau. Pembenahan objek wisata bahwa pembenahan objek wisata alam dan budaya merupakan hal pertama dan terpenting yang perlu dilakukan dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kota Bau-Bau, karena potensi pariwisata di suatu daerah tidak akan berkembang bila tidak dibarengi dengan pembenahan objek wisata itu sendiri. Pembenahan objek wisata alam dan budaya yang dimaksud menyangkut kebersihan objek wisata alam dan budaya, pelestarian objek wisata alam dan objek wisata budaya yang ada di Kota Bau-Bau, pada kawasan objek wisata perlu dilengkapi fasilitas air bersih, jaringan telepon dan sebagainya.

Dalam melakukan pembenahan objek wisata alam dan budaya, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau menggunakan data base objek wisata yang dimiliki untuk menentukan objek wisata apa

saja yang perlu dilakukan pembenahan. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa pembenahan objek wisata budaya lebih sering dilakukan bila dibandingkan dengan pembenahan objek wisata alam. Hal ini disebabkan karena objek wisata budaya yang ada di Kota Bau-Bau sebagian besar lokasinya berada pada Lingkungan Benteng Keraton sehingga pembenahan objek wisata budaya dianggap lebih efektif dan efisien untuk dilakukan.

Pembenahan objek wisata budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau adalah menjaga kebersihan lingkungan Benteng Keraton Buton, membenahi bagian-bagian benteng yang sudah roboh, merenovasi Masjid Agung Keraton Buton.

2. Promosi Objek Wisata

Pada dasarnya promosi objek wisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dengan tujuan untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di suatu daerah. Kegiatan promosi merupakan suatu kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan promosi itu diadakan usaha untuk memperbesar daya tarik objek wisata terhadap calon wisatawan.

Promosi objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau bertujuan untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau kepada masyarakat luas, baik dalam maupun luar negeri. Promosi objek wisata bahwa promosi objek wisata sangat perlu dilakukan sebab dengan promosi, masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri dapat mengetahui potensi objek wisata yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau. Dalam promosi objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bau-Bau.

Adapun Bentuk-bentuk promosi objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau seperti mengikuti pameran pariwisata baik ditingkat

nasional maupun internasional, membuat booklet yang berisi tentang potensi pariwisata Kota Bau-Bau, memasang iklan di media massa baik cetak maupun elektronik dan mengadakan festival keraton nusantara.

3. Pelestarian Nilai Budaya

Upaya pelestarian terhadap kekayaan budaya tradisional suatu daerah juga perlu diperhatikan. Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus seperti klaim negara asing terhadap kesenian tradisional Indonesia, ataupun pencurian terhadap barang-barang arkeologi dan bersejarah. Reservasi terhadap budaya tradisional Indonesia harus diberikan perhatian khusus sehingga budaya asli kita tidak hilang.

Demikian pula yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau dalam strategi pengembangan objek wisata perlu mencantumkan adanya pelestarian nilai budaya Kota Bau-Bau. Bahwa pelestarian nilai budaya sangat penting dilakukan agar tradisi budaya yang kita miliki tetap dipertahankan ditengah era globalisasi seperti sekarang ini. Selain itu juga pelestarian nilai budaya sangat penting dilakukan sebab budaya merupakan potensi pariwisata yang sangat besar bagi suatu daerah khususnya Kota Bau-Bau.

Bentuk pelestarian nilai budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau adalah mengadakan festival Keraton Buton, melakukan seminar-seminar kebudayaan, diskusi budaya, membuat film documenter mengenai kebudayaan Kota Bau-Bau, menetapkan pelajaran Bahasa Daerah Wolio sebagai Mulok (Muatan Lokal) di sekolah-sekolah serta pengenalan situs-situs sejarah kepada siswa. Dan menjadikan nilai - nilai budaya Buton sebagai falsafah bagi aparat di pemerintahan Kota Bau-bau untuk tetap berpedoman pada Falsafah Hidup orang Buton dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

4. Pembangunan Saran dan Prasarana Pariwisata

Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sangat penting untuk mendukung kegiatan pariwisata itu sendiri. Dengan menggunakan prasarana yang cocok, dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, pengadaan bus pariwisata, rumah makan, tempat hiburan, gedung pertunjukan dan sebagainya. Adapun prasarana yang diperlukan untuk membangun sarana-sarana pariwisata adalah jalan raya, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, pelabuhan, telepon dan lain-lain.

Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau menetapkan program kerja yang disebut dengan istilah PIR (Pariwisata Inti Rakyat), dalam hal ini pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata sedangkan yang menjadi penggerak utamanya adalah masyarakat dalam hal ini pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata. Pihak pemerintah hanya membangun prasarana seperti jalan raya, jaringan listrik, jaringan telepon dan sebagainya, yang mendukung pembangunan sarana pariwisata seperti hotel, rumah makan, tempat hiburan dan sebagainya, yang tentunya dilakukan oleh pihak swasta.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau menggunakan data base objek daerah tujuan wisata Kota Bau-bau dalam penyusunan strategi pengembangan objek wisata. Yaitu menggunakan data base objek wisata budaya dan data base objek wisata alam dalam penyusunan strategi pengembangan objek wisata yang di Kota Bau-Bau.
2. Nilai - nilai budaya Buton sebagai falsafah bagi aparat di pemerintahan Kota Bau-bau dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

3. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau belum menciptakan hubungan yang kondusif antara pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata dan masyarakat untuk mewujudkan Bau-Bau sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia Timur.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Laode, 1980. *Sejarah Masuknya Agama Islam di Buton dan Perkembangannya*. Makalah Seminar Masuknya Islam di Buton, Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Bau-Bau.
- Anomim. 2000. *Evaluasi Pengembangan Pariwisata Sulawesi Tenggara*.
- Darmawan, Yusran, 2008. *Antropologi, Ingatan, dan Kesejarahan (Orang Buton Memaknai Tragedi PKI 1969)*. Tesis Program Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.
- David C. McClelland.1961 *Culture and Personality*, Randow House, New York.
- Denzi, Norman K & Lincoln, Yvonna S. Eds, 2000 *Handbook of Qualitative Research, Second Edition*, Sage Publication, Inc.
- Fathansyah. 1995. *Basis Data*. Informatika. Bandung.
- Pusat Data Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. 2004. *Kebijakan Pengembangan Basis Data di Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Rahmat, Jalaludin. 1993. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Rudyansjah, Tony, 1997, *Kaomu, Walaka, dan Papara: Satu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio*, Jurnal Antropologi Indonesia No. 52.
- Schoorl, JW, 2003. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta, Penerbit Djembatan- KITLV.
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Hubungan Antara Sukubangsa*, Jakarta, YPKIK.

- Tahara, Tasrifin, 2007. *Pemekaran Wilayah dan Kontestasi Elit Politik Lokal; Suatu Tinjauan di Wilayah Bekas Kesultanan Buton*. Makalah angdipresentasikan pada Seminar Internasional Ke-Delapan Percik Salatiga, 17-19 Juli 2007.
- Tamim, Amirul, 2008. Strategi Pembangunan Kota Bau-Bau, Dalam *Menyibak Kabut Keraton Buton*, Yusran Darmawan (editor), Respect – Pemerintah Kota Bau-Bau.
- Yoeti, Oka A. 1979. Pemasaran Pariwisata. Angkasa Bandung.
- Yunus, A.R. 1995 *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19, Seri INIS; jil 24*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
- Zaenu, La Ode, 1984. *Buton Dalam Sejarah Kebudayaan*. Surabaya, Suradipa.
- Zahari, Mulku 1977, *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni*, Koleksi Pribadi Belum dipublikasikan.
- Zuhdi, Susanto, Ohorella. GA, Said DM 1996 *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara; Kesultanan Buton*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zuhdi, Susanto, 1999 *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVIII*. Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Pascasarjana FIB Universitas Indonesia, Depok.

Dokumem-Dokumen :

- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Bau-Bau, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bau-Bau, 2005
- Rencana Strategi Kota Bau-Bau Tahun 2003-2007, Kantor Walikota Bau-Bau, 2003